



# REKOMENDASI SIDIK

**SISTEM INFORMASI DATA INDEKS KERENTANAN  
KABUPATEN NAGEKEO**

**Tahun 2025**



Disusun Oleh :  
**TIM SIDIK KABUPATEN  
NAGEKEO**

## **I. PENDAHULUAN**

Pemerintah telah menetapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang digunakan dalam pada RPJMN 2015-2019 yaitu *economically feasible, socially acceptable, environmentally sustainable*. Untuk menerapkan prinsip tersebut membutuhkan prasyarat yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan. Salah satu yang sangat penting dalam perbaikan tata kelola adalah pada bidang SDA alam dan Lingkungan Hidup. Pembangunan berkelanjutan dikonstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan pada semua sektor. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan daerah dataran rendah yang luas, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Indonesia telah mengalami kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, dan kemungkinan akan mengalami efek jangka panjang dari kenaikan permukaan air laut. Dengan pertumbuhan penduduk Indonesia, maka bencana alam yang disebabkan perubahan iklim akan berdampak lebih banyak pada manusia dan mata pencahariannya, sehingga akan lebih sulit untuk bangkit mengurangi kemiskinan. Sebagian masyarakat miskin cenderung tinggal di daerah berisiko tinggi terhadap rawan banjir, tanah longsor, kenaikan permukaan air laut, dan kekurangan air dimusim kemarau. Pemerintah Indonesia memandang konsep yang terintegrasi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya dalam membangun ketahanan dan pengamanan terhadap banjir, ketersediaan air, dan sumber energi, dan telah melakukan upaya signifikan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang terdiri dari kerangka kerja untuk inisiatif adaptasi yang telah diarusutamakan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional. Dengan pemahaman bahwa membangun ketahanan membutuhkan proses yang panjang, biaya adaptasi perubahan iklim Indonesia akan terus bertambah. Oleh karena itu, tujuan adaptasi Indonesia adalah untuk mempertahankan ekonomi masyarakat yang kuat, untuk menjamin keamanan pangan, serta untuk melindungi mata pencaharian dan kesejahteraan rakyat dengan membangun ketahanan bagi masyarakat yang terkena dampak serta ketahanan sektor seperti ketahanan ekosistem, ekonomi dan sistem penghidupan.

### **Mengapa SIDIK**

Tindakan adaptasi akan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahanan dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan

pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melalui Direktorat Adaptasi perubahan iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan (SIDIK) Perubahan Iklim yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES.

### **Tujuan SIDIK**

Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim.

Lebih lanjut, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, ketahanan terhadap perubahan iklim ditekankan sebagai salah satu pilar transformasi pembangunan jangka panjang. Hal ini tercermin dalam misi kelima yaitu "Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi", yang mengadopsi dua indikator utama pembangunan terkait perubahan iklim: (1) proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%), dan (2) persentase penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah menetapkan indikator-indikator tersebut ke dalam 45 Indikator Utama Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai komitmen untuk mengintegrasikan aksi iklim dalam perencanaan pembangunan nasional. Di tingkat daerah, penyelarasan arah pembangunan jangka panjang dan menengah juga telah diatur melalui berbagai regulasi. Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD Tahun 2025–2045, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman teknis penyusunan dokumen RPJPD. Merespons dinamika ini, penyediaan rekomendasi kebijakan menjadi penting sebagai referensi strategis bagi Pemda Nagekeo dalam mendukung proses penyusunan RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD, khususnya dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca melalui penurunan Indeks Kerentanan (SIDIK).

## **II. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Nagekeo propinsi NTT menghadapi tantangan nyata akibat perubahan iklim, yang ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata, pola curah hujan yang semakin tidak menentu, serta peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrem seperti kekeringan panjang dan hujan lebat dalam waktu singkat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap sektor-sektor vital seperti pertanian, ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, dan ketahanan ekonomi lokal. Kerentanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim diperburuk oleh tingkat kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dasar, dan belum optimalnya tata kelola lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya adaptasi yang sistematis, berbasis data, dan berbasis komunitas untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko iklim di masa depan.

Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan isu perubahan iklim ke dalam kebijakan nasional melalui berbagai regulasi dan rencana strategis. Salah satunya adalah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kedua kebijakan ini menekankan pentingnya integrasi aksi iklim dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjalankan program mitigasi (penurunan emisi gas rumah kaca), tetapi juga mendorong adaptasi berbasis risiko dan kerentanan, seperti melalui penurunan Indeks Kerentanan Iklim (SIDIK).

Secara regulatif, amanat untuk mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai turunannya. Ketahanan terhadap perubahan iklim termasuk dalam urusan wajib non-pelayanan dasar yang harus diimplementasikan oleh setiap pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, Nagekeo perlu menyusun kebijakan dan program yang responsif terhadap perubahan iklim, baik dalam dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD). Penyusunan rekomendasi kebijakan ini bertujuan memberikan masukan strategis dan teknis bagi pemerintah daerah agar dapat merumuskan arah pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat

## **III. PERMASALAHAN**

Dalam penyusunan rekomendasi kebijakan ini, rumusan definisi operasional permasalahan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam peraturan tersebut, definisi operasional permasalahan pembangunan diartikan sebagai kesenjangan antara kinerja

pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan target yang direncanakan, serta kesenjangan antara kondisi riil saat ini dengan tujuan yang ingin dicapai di masa depan.

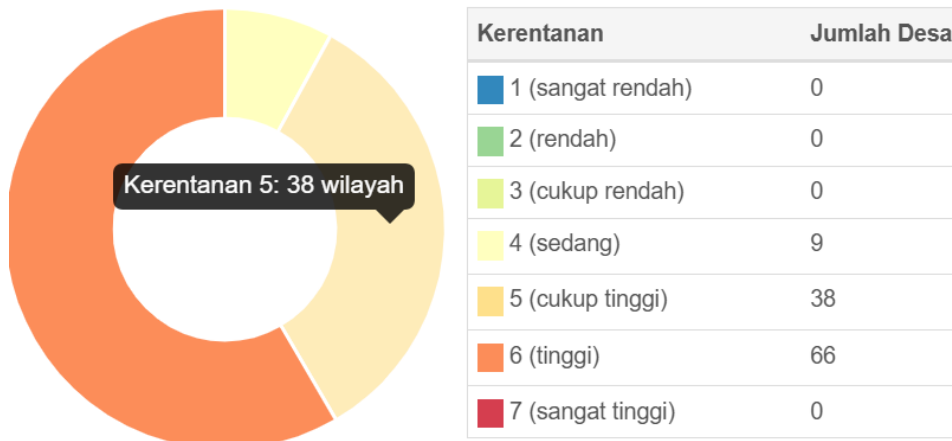
#### **Ketahanan daerah terhadap perubahan iklim**

Penilaian terhadap ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan iklim dilakukan oleh Tim Kerja (TIM SIDIK) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Proses penilaian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dengan menggunakan perangkat penilaian Indeks Kerentanan (SIDIK) yang telah dikembangkan dan ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Berdasarkan hasil penilaian tersebut, diperoleh data dan temuan sebagai berikut:

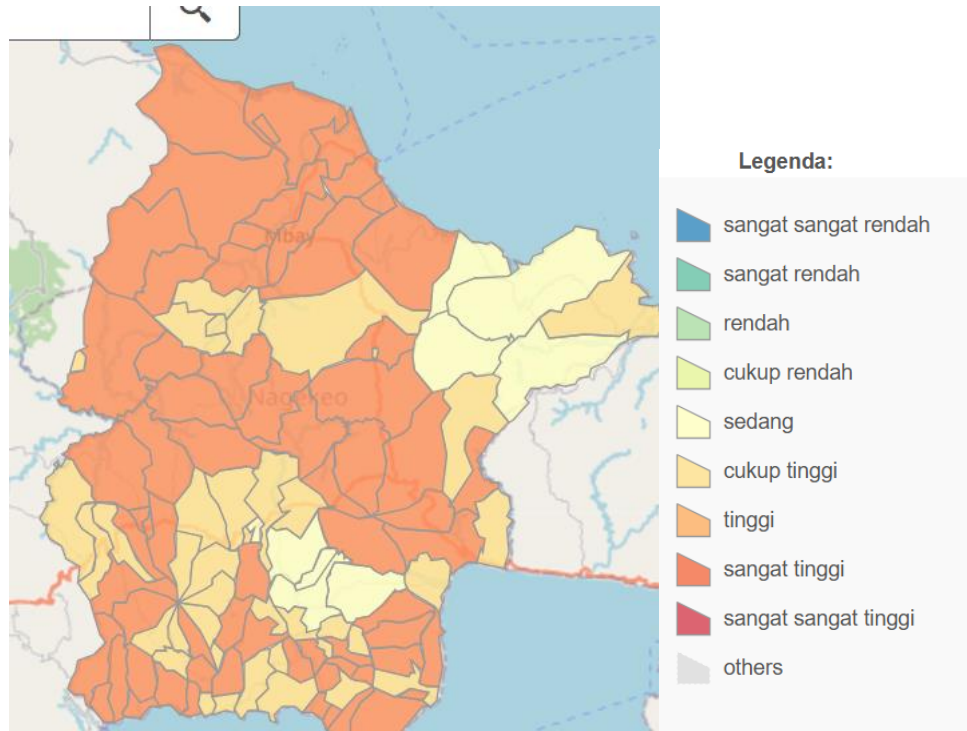
| No | Komponen                      | Indikator                            | Skor |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1  | Keterpaparan dan Sensitifitas | Tingkat Kemiskinan                   | 0,52 |
| 2  |                               | Sumber Mata Penghasilan Utama        | 1,00 |
| 3  |                               | Topografi Desa                       | 0,66 |
| 4  |                               | Sumber Bahan Bakar                   | 1,00 |
| 5  |                               | Tempat Buang Sampah                  | 0,50 |
| 6  |                               | Fasilitas Jamban                     | 0,30 |
| 7  |                               | Kepadatan Penduduk                   | 0,52 |
| 8  |                               | Air Bersih                           | 0,39 |
| 9  |                               | Gizi Buruk                           | 0,00 |
| 10 |                               | Penduduk Disabilitas                 | 0,00 |
| 11 |                               | Penduduk Terdampak Bencana           | 0,00 |
| 12 |                               | Rambu Kebencanaan                    | 0,00 |
| 1  | Kapasitas Adaptif             | Fasilitas Listrik                    | 0,83 |
| 2  |                               | Fasilitas Pendidikan                 | 0,13 |
| 3  |                               | Fasilitas Kesehatan                  | 0,01 |
| 4  |                               | Infrastruktur jalan                  | 0,95 |
| 5  |                               | Kelembagaan                          | 0,73 |
| 6  |                               | Komunikasi                           | 0,75 |
| 7  |                               | Sarana Prasarana Ekonomi             | 0,39 |
| 8  |                               | Industri Kecil dan Mikro             | 0,44 |
| 9  |                               | Lembaga Keuangan                     | 0,41 |
| 10 |                               | Fasilitas Kredit Yang Diterima Warga | 0,40 |
| 11 |                               | Kegiatan Sosial                      | 0,76 |
| 12 |                               | Kegiatan Pelestarian Lingkungan      | 0,33 |

*Tabel 1. Data hasil Penilaian terhadap ketahanan daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025*

## Sebaran Wilayah per Kelas Kerentanan



Dari hasil analisis SIDIK diperoleh data ada 9 desa yang kerentanan sedeng, 38 desa yang kerentanan cukup tinggi, 66 desa kerentanan tinggi



#### IV. REKOMENDASI

Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Nagekeo dilakukan dengan menggunakan pendekatan Manajemen Berbasis Hasil (Results-Based Management). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan berdampak langsung terhadap peningkatan ketahanan daerah. Proses penyusunan melalui beberapa tahapan utama yang dimulai dari identifikasi masalah, perumusan tujuan dan hasil, penyusunan indikator, hingga perumusan strategi dan intervensi kebijakan yang relevan.

##### 1. Identifikasi permasalahan dan isu strategis

Tahapan awal dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang berkaitan dengan ketahanan terhadap perubahan iklim. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Nagekeo berdasarkan hasil penilaian dan analisis situasi antara lain adalah sebagai berikut:

| No | Permasalahan Pokok                      | Penyebab                                                                                |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tingginya keterpaparan dan sensitifitas | Tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional                                           |
|    |                                         | Keterisolasian wilayah                                                                  |
|    |                                         | Cakupan air bersih dan sanitasi yang masih belum optimal                                |
|    |                                         | Pertumbuhan penduduk yang belum terkendali                                              |
| 2  | Minimnya kapasitas adaptif              | Fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan masih belum optimal                          |
|    |                                         | Pembiayaan untuk industri kecil dan mikro masih minim dari lembaga keuangan masih minim |
|    |                                         | Cakupan sarana prasarana ekonomi yang belum optimal                                     |
|    |                                         | Minimnya upaya pelestarian lingkungan                                                   |

*Tabel 2. Permasalahan Kerentanan Kabupaten Nagekeo Tahun 2025*

Sedangkan perumusan isu strategis yang berkaitan dengan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dalam rekomendasi ini menggunakan pendekatan aset penghidupan (livelihood assets). Pendekatan ini diadopsi untuk memahami secara menyeluruh faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi risiko iklim, baik dari sisi individu, rumah tangga, maupun kelembagaan lokal. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi isu strategis secara holistik, lintas sektor, dan berbasis lokal.

Perangkat aset penghidupan yang digunakan terdiri atas lima kategori utama, yaitu:

| No | Komponen      | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Modal Alam    | Ketahanan ekologi Kabupaten Nagekeo di masa depan menghadapi ancaman serius akibat kebijakan pembangunan yang masih bertumpu pada sektor industri ekstraktif sebagai sumber utama pendapatan daerah. Ketergantungan ini, ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan yang meluas dan memperbesar risiko kerentanan terhadap perubahan iklim.                                                              |
| 2  | Modal Manusia | Kapasitas sumber daya manusia secara umum masih belum kompetitif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim. Rendahnya kualitas pendidikan, keterampilan adaptif, dan minimnya inovasi menjadi kendala dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan. Keterbatasan ini juga berdampak pada lambatnya transformasi sosial-ekonomi di tingkat lokal.                                                                        |
| 3  | Modal Ekonomi | Tingkat ketimpangan ekonomi masih tinggi. Kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar, sementara angka kemiskinan tetap tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata dan memperlemah daya tahan ekonomi masyarakat terhadap guncangan iklim dan krisis sosial.                                                                                                                                  |
| 4  | Modal Sosial  | Terjadi pergeseran nilai dan norma sosial di tengah arus globalisasi dan urbanisasi yang cepat. Semakin menguatnya eksklusivitas antar kelompok, memudarnya toleransi, dan tumbuhnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah merupakan cerminan dari menurunnya kohesi sosial. Ketidakadilan sosial menjadi pemicu utama luntarnya solidaritas yang sebelumnya menjadi kekuatan komunitas dalam menghadapi tekanan eksternal, termasuk perubahan iklim. |
| 5  | Modal Fisik   | Masih terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di Nagekeo. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menyebabkan pemerataan dan pemeliharaan infrastruktur dasar—seperti jalan, air                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | bersih, sanitasi, dan irigasi—belum optimal. Ketergantungan tinggi terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat juga memperlambat respons daerah dalam membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabel 3. Rumusan Isu Strategis*

## 2. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi, dirumuskan tujuan jangka menengah serta sasaran spesifik yang terukur dan realistis untuk dicapai dalam lima tahun ke depan dengan pendekatan Theory of Change. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap dimulai dari (a) menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai, kemudian (b) merumuskan hasil-hasil antara (intermediate outcomes) yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan tersebut, (c) mengidentifikasi intervensi program atau kegiatan yang mendukung pencapaian hasil-hasil antara, (d) menyusun kerangka hasil yang menggambarkan hubungan logis antara intervensi dan hasil yang diharapkan, serta (e) menetapkan indikator keberhasilan pada setiap tingkat capaian, yaitu mulai dari ultimate outcome, intermediate outcome, immediate outcome, hingga output. Pendekatan ini memastikan setiap intervensi memiliki kontribusi nyata dan terukur dalam meningkatkan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim secara bertahap dan berkelanjutan.

## 3. Perumusan Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan tingkat Kabupaten Nagekeo ini disusun sebagai bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim sekaligus memperkuat pembangunan berkelanjutan lintas sektor. Rekomendasi ini dihasilkan melalui serangkaian proses analisis yang mengacu pada pendekatan Manajemen Berbasis Hasil (Results-Based Management) dan telah diselaraskan secara sistematis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usulan kebijakan yang diajukan memiliki relevansi dan sinkronisasi yang kuat dengan arah pembangunan jangka panjang daerah, serta memperkuat dasar perencanaan program lintas sektor—termasuk bidang energi terbarukan, pendidikan, perlindungan sosial, lingkungan hidup, pertanian, pengelolaan risiko bencana, dan tata kelola kelembagaan.

| No | Indeks | Indikator         | Rekomendasi strategis                                                                                                                                                                                                                                                             | Rekomendasi teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | IKA    | Sektor Listrik    | 1. Memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro di wilayah yang belum terjangkau listrik<br>2. Kolaborasi kegiatan maupun anggaran dengan pihak swasta, agar masyarakat dapat mengakses akses listrik secara merata                                            | 1. Pemasangan listrik gratis bagi KK miskin sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)<br>2. Menambah jumlah lampu jalan tenaga surya sebagai langkah efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan di ruang publik.<br>3. Pengembangan energi listrik berbasis potensi lokal pedesaan (tenaga air dan tenaga surya)<br>4. Perluasan jaringan listrik ke desa-desa yang belum terjangkau Listrik untuk memastikan akses energi yang merata dan berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  |        | Sektor Pendidikan | Memperkuat kualitas pendidikan dengan meningkatkan kapasitas guru, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dan kemitraan untuk menciptakan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas serta tangguh | 1. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan melalui gerakan pelatihan, pendampingan, dan insentif khusus bagi pendidik di daerah terpencil guna menjamin mutu Pendidikan<br>2. Pemerataan Tenaga Pendidik di setiap Sekolah sehingga sesuai dengan kebutuhan sekolah<br>3. Penambahan jumlah sarana dan prasarana Pendidikan (kursi/bangku, meja, ruangan kelas baru, laboratorium serta fasilitas penunjang lainnya sesuai kebutuhan sekolah)<br>4. Membangun dan atau merehabilitasi sarana penunjang Pendidikan seperti MCK, perpustakaan, ruang UKS, kantin sehat, dan sarana olahraga untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan layak.<br>5. Membangun ketangguhan sekolah dalam menghadapi bencana (SPAB) agar warga sekolah aman dari resiko bencana |

|   |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |  | Sektor Kesehatan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan layanan kesehatan dasar dengan memperkuat fasilitas Kesehatan di puskesmas, polindes dan posyandu,</li> <li>2. Memperluas jangkauan tenaga kesehatan ke semua desa</li> <li>3. Mendorong edukasi gizi dan kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Layanan Kesehatan Dasar di puskesmas, pustu dan polindes melalui penambahan dan melengkapi alat kesehatan esensial, serta penyediaan obat-obatan dan vaksin secara berkala dan tepat waktu</li> <li>2. Pembangunan atau rehabilitasi puskesmas dan posyandu dengan fasilitas dasar yang layak (air bersih, listrik, toilet, ambulans).</li> <li>3. Menambah dan merekrut serta dan mendistribusikan tenaga Kesehatan di puskesmas, pustu dan polindes secara merata</li> <li>4. Memberikan insentif khusus atau tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan di desa yang terpencil.</li> <li>5. Melatih kader posyandu untuk pemantauan gizi, kesehatan ibu-anak, dan penyuluhan rutin.</li> <li>6. Peningkatan layanan gizi dan penurunan stunting dengan menyediakan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil dan penyuluhan rutin tentang kesehatan</li> <li>7. Melakukan penilaian dan pemeriksaan kualitas air secara berkala melalui pengambilan sampel di sumber-sumber mata air.</li> <li>8. Mengintensifkan sosialisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui metode 3M+ untuk mencegah penyakit yang meningkat saat musim hujan.</li> <li>9. Melakukan sosialisasi penggunaan air bersih yang bijak dan aman, khususnya saat terjadi perubahan musim yang memengaruhi ketersediaan dan kualitas air.</li> <li>10. Menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat sektor kesehatan</li> </ol> |
| 4 |  | Sektor Kelembagaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat desa dan OPD melalui pelatihan, pendampingan tata kelola, serta integrasi perencanaan lintas sektor agar lembaga-lembaga lokal lebih responsif, transparan, dan mampu mendorong pembangunan berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat</li> </ol>                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan Lembaga local tentang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan serta memfasilitasi penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes</li> <li>2. Pembentukan dan Peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana (Destana) di setiap desa untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |                        | <p>2. Pemerintah Kabupaten Nagekeo perlu membentuk Lembaga-lembaga local yang responsif, transparan, dan mampu mendorong pembangunan berbasis potensi dan kebutuhan Masyarakat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>3. Penambahan jumlah rambu evakuasi dan rambu peringatan di lokasi-lokasi rawan bencana guna meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan.</p> <p>4. Pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) untuk potensi bencana tsunami di wilayah pesisir</p> <p>5. Pengadaan sara dan prasarana kebencanaan di BPBD sehingga mengurangi risiko bencana</p> <p>6. Pembentukan dan Peningkatan kapasitas Kampung iklim (Proklam) di setiap desa untuk penurunan kerentanan.</p> <p>7. Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi di desa (BUMDES, UBSP, Kelompok tani, Gapoktan) untuk mendukung ketangguhan ekonomi masyarakat</p> |
| 5 |  | Sektor Komunikasi      | <p>1. Peningkatan kualitas dan perluasan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten Nagekeo untuk mendukung konektivitas dan akses informasi.</p> <p>2. Penyediaan sarana komunikasi murah di ruang-ruang publik guna memperluas akses layanan digital bagi masyarakat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1. Perluasan jaringan komunikasi ke wilayah-wilayah blank spot untuk menjamin akses informasi yang merata.</p> <p>2. Penyediaan jaringan internet di ruang-ruang publik guna mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.</p> <p>3. Membangun digitalisasi layanan informasi public seperti website resmi OPD dan Desa sebagai pusat informasi publik</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 |  | Sektor Sarpras Ekonomi | <p>1. Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, pasar rakyat, irigasi, sarana pasca panen dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian guna memperlancar distribusi, menekan biaya usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah</p> <p>2. Penertiban koperasi jasa keuangan yang tidak sesuai regulasi untuk melindungi masyarakat dari praktik ilegal.</p> <p>3. Pemantauan fasilitas dan lembaga keuangan yang legal guna memastikan keamanan dan akuntabilitas layanan keuangan.</p> | <p>1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur produksi melalui Pembangunan atau perbaikan jalan usaha tani, sarana irigasi, dan embung</p> <p>2. Pembangunan sarana penunjang pertanian seperti Gudang penyimpanan dan sarana panen dan pasca panen komoditi</p> <p>3. Penambahan jumlah lapak UMKM di pasar umum harian, pasar mingguan dan di kawasan wisata strategis.</p> <p>4. Penyediaan akses permodalan yang mudah serta fasilitas kredit dengan suku bunga rendah bagi pelaku UMKM.</p> <p>5. Peningkatan pemantauan terhadap fasilitas kredit untuk memastikan keamanan dan perlindungan konsumen.</p>                     |

|   |  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |  | Sektor Industri Kecil & Mikro  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pengembangan industri kecil dan mikro melalui pelatihan keterampilan, fasilitasi alat produksi, akses pembiayaan, dan penguatan pemasaran agar pelaku usaha lokal dapat tumbuh, mandiri, dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga dan daerah</li> <li>2. Penyusunan peraturan tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis desa secara berkelanjutan dan partisipatif.</li> <li>3. Penyusunan regulasi tentang batas maksimal suku bunga bagi UMKM dan pengusaha kecil untuk mendorong iklim usaha yang sehat dan inklusif.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan peningkatan kapasitas teknis produksi (tenun, olahan pangan, kerajinan, dll.) sesuai potensi desa</li> <li>2. Pelatihan pemasaran produk melalui platform digital.</li> <li>3. Pemberian subsidi modal bagi usaha kecil dan menengah.</li> <li>4. Bantuan peralatan produksi seperti alat tenun, mesin pengemas, alat pengolah hasil pertanian.</li> <li>5. Pendampingan untuk memperoleh izin usaha khusus produk olahan keluarga</li> </ol>                                                       |
| 8 |  | Sektor Lembaga Keuangan        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat peran lembaga keuangan lokal seperti koperasi, BUMDes, dan UBSP dengan peningkatan kapasitas tata kelola, perluasan akses pembiayaan bagi usaha rakyat</li> <li>2. Penguatan regulasi dan pengawasan agar lembaga keuangan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat desa</li> <li>3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal dan pengelolaan aset daerah.</li> <li>4. Peningkatan jumlah investor dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif</li> </ol>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan keuangan melalui pelatihan, kursus dan magang</li> <li>2. Edukasi pengelolaan keuangan Masyarakat melalui pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga, menabung, dan atau investasi</li> <li>3. Membuka lebih banyak peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan pengembangan potensi lokal.</li> <li>4. Menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan guna menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah</li> </ol> |
| 9 |  | Sektor Fasilitasi Kredit Warga | Mendorong fasilitasi kredit yang terjangkau dan mudah diakses bagi warga, khususnya pelaku usaha kecil, petani, dan perempuan, melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, pendampingan penyusunan proposal usaha, serta penguatan literasi keuangan untuk memastikan pemanfaatan kredit yang produktif dan berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerjasama dengan Lembaga penyedia fasilitas kredit suku bunga rendah guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat</li> <li>2. Integrasi program kredit dengan sektor produktif seperti kredit sektor pertanian, peternakan, tenun, dan usaha mikro</li> <li>3. Literasi dan edukasi keuangan melalui pelatihan pengelolaan pinjaman, risiko utang, dan penggunaan kredit produktif</li> </ol>                                                                                          |

|    |     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |     | Sektor Kegiatan Sosial        | Memperkuat kegiatan sosial berbasis komunitas dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat, penguatan kelembagaan sosial lokal, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan solidaritas, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan dan pendampingan kelompok sosial desa seperti Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan forum peduli disabilitas.</li> <li>2. Memberikan bantuan dana dan sarana penunjang kepada anak yatim, lansia, penyandang disabilitas, dan rumah tangga miskin ekstrem</li> <li>3. Memberikan bantuan sesuai kebutuhan spesifik, seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu lainnya bagi penyandang disabilitas.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 |     | Sektor Pelestarian Lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pelestarian lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan masyarakat, edukasi ekologis, rehabilitasi lahan kritis, serta pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat</li> <li>2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Mata Air</li> <li>3. Pendidikan dan Kesadaran Publik tentang isu pelestarian lingkungan sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.</li> <li>4. Manajemen Bencana dan Adaptasi Ekologis melalui Penguatan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, konservasi ekosistem, dan sistem peringatan dini untuk menjaga ketahanan lingkungan dari ancaman bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Mata Air yang mengatur tentang pelestarian, pemanfaatan, dan perlindungan sumber mata air secara berkelanjutan</li> <li>2. Melakukan konservasi di sekitar sumber mata air dan dilahan kritis sehingga menjaga kelestarian lingkungan</li> <li>3. Memfasilitasi pemerintahan desa untuk Menyusun perdes tentang pengelolaan sumberdaya alam</li> <li>4. Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas untuk mengurangi limbah rumah tangga</li> <li>5. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan melalui pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kepedulian dan aksi nyata masyarakat</li> <li>6. Pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi yang ramah lingkungan.</li> <li>7. Manajemen Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim melalui pelatihan kesiapsiagaan untuk menghadapi dampak perubahan iklim.</li> </ol> |
| 1  | IKS | Sektor Tingkat Kemiskinan     | Menurunkan tingkat kemiskinan melalui penguatan ekonomi rumah tangga miskin, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan berbasis data yang akurat dan partisipatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan akses layanan dasar berupa Penyediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi.</li> <li>2. Penurunan Indeks Kemiskinan Berbasis Desa melalui program-program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi di tingkat desa.</li> <li>3. Pemberdayaan kelompok marginal melalui Program pemberdayaan ekonomi khusus untuk perempuan kepala keluarga, lansia miskin, dan penyandang disabilitas.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penyediaan Pasar Murah di Setiap Kecamatan secara rutin</li> <li>5. Penguatan Akses Pasar bagi Hasil Pertanian Desa melalui kemitraan dengan BUMDes, koperasi, atau pihak swasta lainnya</li> <li>6. Dukungan Sarana Produksi untuk Petani berupa benih, bibit dan sarana pertanian lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 |  | Sektor Sumber Penghasilan Utama | Memperkuat dan mendiversifikasi sumber penghasilan utama masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan ekonomi lokal lainnya, didukung akses pasar, teknologi, dan pelatihan berbasis potensi wilayah                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Lahan Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.</li> <li>2. Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan yang berkualitas</li> <li>3. Pelatihan Pemasaran Hasil Pertanian Berbasis Digital sehingga produk dikenal oleh pihak luar</li> <li>4. Diversifikasi usaha rumah tangga agar tidak bergantung pada satu komoditas (misalnya kombinasi usaha tani dan ternak).</li> <li>5. Pengembangan usaha mikro dan keluarga melalui pendampingan kelompok usaha perempuan (tenun, olahan pangan, kerajinan) dan Dukungan perizinan usaha, pelabelan produk, dan akses ke pasar digital.</li> </ol> |
| 3 |  | Sektor Topografi Desa           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Nagekeo perlu memperhitungkan kondisi topografi desa dalam perencanaan pembangunan dengan mendorong infrastruktur adaptif, tata ruang berbasis bentang alam.</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Lahan Sesuai Topografi Desa untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Pembangunan Permukiman Sesuai Topografi Desa - Melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan permukiman yang mempertimbangkan kondisi topografi desa, guna meminimalkan risiko bencana dan mendukung keberlanjutan lingkungan</li> <li>2. Integrasi topografi desa dalam kebijakan tata ruang kabupaten, pembangunan infrastruktur dan alokasi anggaran melalui Sinkronisasi lintas sektor (PUPR, BPBD, pertanian, pariwisata) dalam perencanaan yang mempertimbangkan topografi</li> </ol>                                                                                                |
| 4 |  | Sektor Sumber Bahan Bakar       | Mengembangkan akses dan diversifikasi sumber bahan bakar ramah lingkungan melalui pemanfaatan energi terbarukan, penguatan distribusi LPG, serta edukasi penggunaan bahan bakar alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada kayu bakar dan menjaga kelestarian lingkungan                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Biogas untuk Memasak -</li> <li>2. Penggunaan tungku hemat energi kayu bakar</li> <li>3. Kampanye penggunaan kompor LPG, biogas, atau kompor hemat bahan bakar bagi masyarakat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 |  | Sektor Tempat Buang Sampah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun dan mengelola sistem tempat pembuangan sampah terpadu di tingkat kabupaten, desa dan kecamatan, dengan pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), agar pengelolaan sampah menjadi lebih tertib, sehat, dan ramah lingkungan</li> <li>2. Penyusunan Regulasi Pengelolaan Sampah Berbasis Keluarga</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan Penambahan Sarpras tempat pembuangan sampah yang ramah lingkungan</li> <li>2. Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Masyarakat Desa</li> <li>3. Program Bank Sampah di Sekolah -</li> <li>4. Pengadaan Armada Sampah Ramah Lingkungan</li> <li>5. Pelatihan Pengelolaan Sampah bagi Kader dan Kelompok Masyarakat</li> <li>6. Pemanfaatan Sampah Organik untuk Kompos Rumah Tangga</li> </ol>                                                                                                                                 |
| 6 |  | Sektor Fasilitas Jamban    | Mempercepat akses jamban sehat dan layak di seluruh desa melalui program sanitasi berbasis masyarakat, subsidi untuk keluarga miskin, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat guna mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup warga                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan MCK komunal di setiap desa dan di kabupaten.</li> <li>2. Edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 |  | Sektor Kepadatan Penduduk  | Mengelola kepadatan penduduk melalui pemerataan pembangunan antarwilayah, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta peningkatan akses layanan dasar di daerah padat dan terpencil untuk menciptakan keseimbangan demografis yang berkelanjutan                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten agar memperhatikan kepadatan dan daya dukung lingkungan.</li> <li>2. Penataan kawasan permukiman agar bebas dari kekumuhan</li> <li>3. Pengelolaan program transmigrasi lokal untuk pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan</li> <li>4. Pencanangan program Rumah Sederhana Sehat (RSS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah</li> </ol>                                                                                                                                |
| 8 |  | Sektor Air Bersih          | Memperluas akses air bersih yang layak dan berkelanjutan melalui pembangunan sarana air minum berbasis sumber lokal, perlindungan mata air, serta penguatan kapasitas pengelolaan air oleh masyarakat desa.                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur air bersih</li> <li>2. Perlindungan mata air melalui Upaya konservasi hulu daerah tangkapan air.</li> <li>3. Penyediaan sumur bor di daerah yang kesulitan mata air</li> <li>4. Edukasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) - Pelaksanaan edukasi berkelanjutan di sekolah, desa, dan fasilitas layanan kesehatan tentang pentingnya kebersihan diri, sanitasi lingkungan, dan pola hidup sehat untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan dan memperkuat ketahanan masyarakat.</li> </ol> |

|    |  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  |  | Sektor Gizi Buruk                 | Memperkuat penanganan gizi buruk melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan edukasi gizi keluarga, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin di tingkat desa                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi gizi dan pola asuh bagi ibu balita dan ibu hamil</li> <li>2. Intervensi gizi specific melalui pemberian makanan tambahan yang bergizi serta pemberian vitamin atau suplemen</li> </ol>                                                                                             |
| 10 |  | Sektor Penduduk Disabilitas       | Memperkuat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui peningkatan aksesibilitas layanan dasar, penyediaan data disabilitas yang akurat, serta pelibatan aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi di tingkat desa.                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan dan identifikasi disabilitas di setiap desa termasuk jenis dan tingkat disabilitasnya</li> <li>2. Penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas</li> <li>3. Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di tempat ibadah dan fasilitas umum</li> </ol> |
| 11 |  | Sektor Penduduk Terdampak Bencana | Memperkuat sistem peringatan dini, membangun infrastruktur tangguh, serta memperluas bantuan sosial bagi kelompok rentan. Pelatihan kesiapsiagaan dan edukasi kebencanaan juga penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat secara menyeluruh.                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan Wilayah melalui kajian risiko bencana</li> <li>2. Penguatan dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)</li> <li>3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Evakuasi</li> <li>4. Penguatan koordinasi lintas sektor dan kelembagaan seperti SOP, dll</li> </ol>                 |
| 12 |  | Sektor Rambu Kebencanaan          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat pemasangan rambu kebencanaan di lokasi rawan bencana Untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat</li> <li>2. Menyusun regulasi tentang kewajiban instansi pemerintah/swasta untuk memasang rambu-rambu kebencanaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi tentang pemasangan rambu-rambu kebencanaan</li> <li>2. Pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi di setiap wilayah rawan bencana -.</li> <li>3. Penempatan sarana yang memadai serta petugas kebencanaan di wilayah rawan</li> </ol>                                               |

## **V. Penutup**

Rekomendasi dan strategi ketahanan iklim yang disusun di tingkat Kabupaten Nagekeo berdasarkan Analisa Sistem Informasi dan Data Indeks Kerentanan Iklim (SIDIK) ini diharapkan dapat menjadi arah kebijakan yang operasional dan aplikatif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang kian kompleks. Dengan pendekatan berbasis hasil, analisis lintas sektor, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan kabupaten yaitu RPJP dan RPJMD 2025 - 2029, upaya peningkatan kapasitas adaptif masyarakat dan kelembagaan dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi antarpemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan—dalam menggerakkan sumber daya dan inovasi lokal guna mewujudkan Nagekeo yang tangguh terhadap perubahan iklim.

# PESERTA REKOMENDASI SIDIK 2025



## PROGRAM TERPADU PENGARUSUTAMAAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

### DAFTAR HADIR

(Attendance Sheet)

Version: February 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                 |             |                            |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|----|
| Nama Kegiatan<br>(sesuai dokumen rencana program)                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitasi penyusunan rekomendasi dari hasil kajian kerentanan-SIDIK dan advokasi kebijakan dan perencanaan daerah yang adaptif terhadap PI dan PRB |                 |             |                            |    |
| Kode Kegiatan<br>(sesuai dokumen rencana program)                                                                                                                                                                                                                         | A.2.2.3                                                                                                                                             |                 |             |                            |    |
| Kode Indikator<br>(sesuai dokumen rencana program)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                 |             |                            |    |
| Tanggal Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 Mei 2025                                                                                                                                         | Tempat Kegiatan | Kantor YMTM |                            |    |
| Nama Fasilitator Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                 | Marselinur B.M. Mau                                                                                                                                 | Provinsi        | NTT         |                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | Kabupaten       | Nagekeo     |                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | Desa            | -           |                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | Kelompok Dusun  | -           |                            |    |
| Penanggung Jawab (PJ) Kegiatan/Daftar Hadir                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | Total Individu  | Laki-Laki   | Perempuan                  |    |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oktavianus Watu                                                                                                                                     | Tanda Tangan    |             | Peserta Program (P)        | 15 |
| Posisi / Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                          | PL                                                                                                                                                  |                 |             | Bukan Peserta Program (BP) | 0  |
| <p>Persetujuan: Dengan menandatangani formulir di bawah ini, anda menyetujui pengumpulan dan penggunaan informasi serta dokumentasi dalam kegiatan ini untuk kebutuhan pencatatan, pelaporan, dan publikasi Program Terpadu Pengarusutamaan Adaptasi Perubahan Iklim.</p> |                                                                                                                                                     |                 |             |                            |    |



| No | Nama Lengkap Partisipan<br>(Sesuai ID/KTP) | Nama Kepala Keluarga            | Peran dlm rumah tangga/keluarga<br>(1/2/3/4)* | Dusun Asal | Jenis Kelamin (P/L) | Tahun Lahir | Nama Instansi/Lembaga/Kelompok | No. Telepon    | Tanda Tangan | Ket.<br>(P/BP) |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1  | drg. Emerentiana R. Wahjuningih            | drg. Emerentiana R. Wahjuningih | 1                                             | Dangz      | P                   | 1972        | DINAS KESEHATAN                | 089934416022   |              |                |
| 2  | FRANSISKUS ROSA                            | FRANSISKUS ROSA                 | 1                                             | AGERAMO    | L                   | 1976        | BAPPENLITBANGGA                | 08123925411    |              |                |
| 3  | Klementina DWID                            | Klementina DWID                 | 1                                             | AGERAMO    | P                   | 1967        | DINAK                          | 081358409848   |              |                |
| 4  | Maru R. Bua Bua                            | Prinus S. Wines                 | 1                                             | Dangz      | P                   | 1977        | DISTOP                         | 0812367222     |              |                |
| 5  | ARIF HASIN A                               | ARIF HASIN                      | 1                                             | Dangz      | L                   | 1979        | Dinas PUPK                     | 081339285135   |              |                |
| 6  | HAIFURY A. HUSEIN                          | HASRULF GANI                    | 3                                             | KOLIKAPA   | P                   | 1983        | Dinas Kesehatan                | 081286970132   |              |                |
| 7  | AGATHA BUNLA                               | BERTOLDUS L. GEMU               | 3                                             | PISA       | P                   | 1981        | Bappelitbangga                 | 08214664438    |              |                |
| 8  | Kristina H. Dhae                           | DAMIUNUS S. ROGN.               | 1                                             | PISA       | P                   | 1982        | DLH                            | 085-253-850134 |              |                |

| No  | Nama Lengkap Partisipan (Sesuai ID/KTP) | Nama Kepala Keluarga | Peran dlm rumah tangga/ keluarga (1/2/3/4)* | Dusun Asal | Jenis Kelamin (P/L) | Tahun Lahir | Nama Instansi/Lembaga/ Kelompok | No. Telepon   | Tanda Tangan | Ket. (P/BP) |
|-----|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 9.  | Maria Della Strada                      | Josef Ryan           | 1                                           | Danga      | P                   | 1995        | DLK                             | 085 333803192 |              |             |
| 10  | Rufus Raga                              | Rufus Raga           | 1                                           | Waetokadi  | L                   | 1965        | Dinsos                          | 082331900510  |              |             |
| 11. | Amehus wone                             | Amehus wone          | 1                                           | Mbay       | L                   | 1971        | YMPM                            | 081539081717  |              |             |
| 12. | M.U. Dudi Dwi                           | M.U. Dudi Dwi        | 1                                           | Mbay       | L                   | 1972        | BPBD                            | 081353034834  |              |             |
| 13  | Elisus Dwi                              | Elis Dwi             | 1                                           | Mbay       | L                   | 1979        | Dinsos                          | 08214720574   |              |             |
| 14  | Primus N                                | Primus N             | 1                                           | Mbay       | L                   | 1978        | Dwi                             |               |              |             |
| 15  | Ramadhan Mubakar                        |                      | 1                                           | Mbay       | L                   | 1973        | PK                              | 082247424783  |              |             |
| 16  | Immanuel Wono                           | Patricius Juma       | 3                                           | Dinsos     | P                   | 1981        | DPD                             | 082144821992  |              |             |

| No  | Nama Lengkap Partisipan (Sesuai ID/KTP) | Nama Kepala Keluarga | Peran dlm rumah tangga/ keluarga (1/2/3/4)* | Dusun Asal     | Jenis Kelamin (P/L) | Tahun Lahir | Nama Instansi/Lembaga/ Kelompok | No. Telepon     | Tanda Tangan | Ket. (P/BP) |
|-----|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 17  | SOFIA MARU                              | SOFIA MARU           | 1                                           | Danga          | P                   | 1998        | Dinas Pongon Daerah             | 08 22 4428 4573 |              |             |
| 18  | Ramadhan Mubakar                        | Ramadhan Mubakar     | 1                                           | Mbay           | L                   | 1973        | PK                              | 082237424783    |              |             |
| 19  | Elisus Dwi                              | Elisus Dwi           | 1                                           | Mbay           | L                   | 1979        | Dinsos                          | 08214420574     |              |             |
| 20  | Eusebius V. Lipo Awi                    | Eusebius V. Lipo Awi | 1                                           | Mbay           | L                   | 1972        | Dinsos                          | 08133804464     |              |             |
| 21  | Mikael Nipa                             | Mikael Nipa          | 1                                           | Mbay           | L                   | 1984        | Dinsos                          | 08122875214     |              |             |
| 22  | Heronimus Bay                           | Heronimus Bay        | 1                                           | Mbay           | L                   | 1985        | DINSOS                          | 081339961078    |              |             |
| 23. | Ernestus Mali Mui                       | Ernestus Mali Mui    | 1                                           | M <sup>2</sup> | L                   | 1978        | YMPM                            | 08214473864     |              |             |
| 24  | Mikhael Nday                            | Mikhael Nday         | 1                                           | M <sup>2</sup> | L                   | 1980        | JMTM                            | 081213962749    |              |             |